



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA **TAHUN 2022**





INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA **TAHUN 2022**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022

Nomor Publikasi : 11110.2134
Nomor Katalog BPS : 4102004.1111
Nomor ISSN : -

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 63 halaman

Naskah:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Sampul:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh:
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Penanggung Jawab:
Andi Hardiyanto, S.ST

Pengarah:
Riki Triandicki, S.Tr.Stat

Penulis:
Riki Triandicki, S.Tr.Stat

Pengolah Data:
Riki Triandicki, S.Tr.Stat

Desain dan Layout:
Riki Triandicki, S.Tr.Stat

<https://aceh.arab.bps.go.id>



KATA PENGANTAR

Penerbitan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Utara disusun mengingat data sosial ekonomi dibutuhkan untuk memberikan gambaran proses dan hasil pembangunan sebagai bahan umpan balik bagi para pengguna data. Data yang disajikan mencakup aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan sosial lainnya yang berasal dari hasil pengumpulan data Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan Sensus Penduduk (SP2020) yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara.

Publikasi ini disajikan dalam nilai maupun persentase, disertai dengan visualisasi data berupa tabel-tabel dan grafik yang diikuti oleh uraian mengenai konsep dan definisi. Penyajian menurut indikator kesejahteraan rakyat sosial dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kesejahteraan penduduk di Kabupaten Aceh Utara.

Dengan diterbitkannya publikasi ini, diharapkan dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan yang ditunjukkan pada setiap indikator sehingga membantu terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga publikasi ini dapat terwujud.

Lhoksukon, Desember 2022

Kepala BPS
Kabupaten Aceh Utara



Andi Hardiyanto, S.ST

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
1. KEPENDUDUKAN	1
1.1. Jumlah dan Pertambahan Penduduk	3
1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk	5
1.3. Komposisi Penduduk	8
1.4. Angka Beban Ketergantungan	10
1.5. Keluarga Berencana	11
2. KESEHATAN	13
2.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	15
2.2. Penolong Kelahiran.....	17
2.3. Berat Badan Bayi dan Tempat Melahirkannya	18
3. PENDIDIKAN.....	21
3.1. Tingkat Pendidikan	23
3.2. Tingkat Partisipasi Sekolah.....	26
4. KETENAGAKERJAAN	31
4.1. Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	33
4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	34
5. PERUMAHAN	37
5.1. Kepemilikan Tempat Tinggal	39
5.2. Kualitas Tempat Tinggal	40

6. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	45
7. SOSIAL LAINNYA	51
7.1. Kepemilikan Alat dan Akses Informasi Komunikasi	53
7.2. Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga	54
Daftar Pustaka	55
Lampiran	57

<https://acehutarakab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Halaman

1.	KEPENDUDUKAN	1
1.1	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Aceh Utara, 2020 dan 2021.....	4
1.2	Jumlah Penduduk dan Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, 2021	6
1.3	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, 2021	7
1.4	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Utara, 2020	9
1.5	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Aceh Utara, 2021	10
2.	KESEHATAN DAN GIZI	13
2.1	Angka Morbiditas atau Angka Kesakitan di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022	16
2.2	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 14-59 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022.....	18
2.3	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Berat Badan Bayi di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022.....	18
2.4	Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Tempat Melahirkan di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022.....	19
3.	PENDIDIKAN	21
3.1	Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Utara, 2016-2020	24
3.2	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022.....	26
3.3	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022.....	26

3.4	Angka Partisipasi Murni Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022.....	28
4.	KETENAGAKERJAAN	31
4.1	Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2020.....	34
4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022	35
5.	PERUMAHAN.....	37
5.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022	39
5.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022.....	41
5.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022.....	42
5.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022.....	43
6.	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	45
6.1	IPM dan Peringkatnya dalam Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022	48
6.2	Perkembangan Komponen Penyusun IPM di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022	49
7.	SOSIAL LAINNYA	51
7.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Aceh Utara, 2022.....	54

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.	KEPENDUDUKAN	1
1.1	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Aceh Utara, 2020 dan 2021	4
1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Utara, 2021	10
1.3	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022	12
2.	KESEHATAN DAN GIZI	13
2.1	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Saat Berobat di Kabupaten Aceh Utara, 2022	17
3.	PENDIDIKAN	21
3.1	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Utara, 2016-2020	25
3.2	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Aceh Utara, 2022	27
3.3	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Sekolah di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022.....	29
4.	KETENAGAKERJAAN	31
4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022	35
5.	PERUMAHAN.....	37
5.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Tempat Tinggal Milik Sendiri di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022	40

6.	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	45
6.1	Klasifikasi Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	47
6.2	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita dan Laju Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022.....	50
7.	SOSIAL LAINNYA	51
7.1	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Penggunaan Teknologi Informasi (Telepon, Komputer, dan Internet) dan Jenis Kelamin Selama 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Aceh Utara, 2022	53

<https://acehutarakab.go.id>

BAB I

KEPENDUDUKAN

<https://acehtarakab.bps.go.id>

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki jumlah penduduk yang berada di urutan keempat terbesar di dunia setelah dari China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah Penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai 270.203.917 jiwa. Karakteristik wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam melakukan pemerataan penduduk. Pemerataan penduduk dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat yang merata dan tidak terkonsentrasi di beberapa pulau saja.

Keberadaan penduduk disuatu wilayah merupakan syarat terbentuknya suatu wilayah pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jumlah penduduk yang berkembang dari tahun ke tahun menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat dan daerah, serta menjadi bagian penting pada kesejahteraan rakyat seperti tertera pada sila keempat Pancasila. Dinamika penduduk dan bonus demografi menjadi isu utama yang dihadapi dalam menanggapi hasil proyeksi penduduk tahun 2015-2035 dimana penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif dengan nilai angka beban ketergantungan dibawah 50 persen.

Dinamika kependudukan yang terjadi di Indonesia menjadi alasan penting bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga bagi pemerintah daerah khususnya. Perubahan indikator kependudukan daerah yang akan disajikan pada bab kependudukan ini meliputi jumlah dan penambahan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk, angka beban ketergantungan, dan keluarga berencana. Berdasarkan kelima subbab pembahasan mengenai kependudukan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kependudukan di Kabupaten Aceh Utara dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

Perhatian khusus pada bidang kependudukan merupakan langkah awal untuk memulai meningkatkan perhatian pada tingkat kesejahteraan penduduk. Setiap kebijakan pemerintah yang diambil tanpa berdasarkan data kependudukan yang aktual akan menyebabkan bias dan menambah masalah kependudukan yang ada. Sehingga diperlukan kesinambungan perhatian pada data kependudukan yang aktual dengan kebijakan kependudukan yang diambil.

1.1 JUMLAH DAN PERTAMBAHAN PENDUDUK

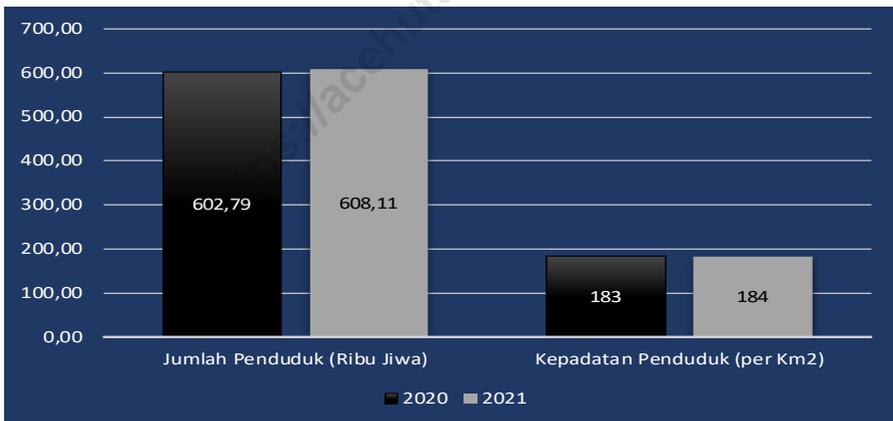
Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2021 adalah sebesar 608.106 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang dapat dilihat dari besaran nilai laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 yang bernilai 0,88 persen. Dari segi Kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2021 berjumlah 184 jiwa/km² yang berarti secara rata-

rata, setiap satu kilometer wilayah di Kabupaten Aceh Utara ditempati sekitar 184 jiwa. Adapun untuk rasio jenis kelamin pada tahun 2021 bernilai 99,99 yang berarti rasio antara jumlah penduduk pria dan wanita di Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2021 itu hampir sama.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Aceh Utara, 2020 dan 2021

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Kepadatan Penduduk per Km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020	602.793	1,22	183	99,99
2021	608.106	0,88	184	99,99

Sumber: Kabupaten Aceh Utara Dalam Angka, 2022



Gambar 1.1 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Aceh Utara, 2020 dan 2021

Sumber: Kabupaten Aceh Utara Dalam Angka, 2022

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat dari Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 5.313 jiwa. Disisi lain, kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2021 juga

mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020 yang semula bernilai 183 jiwa/km² menjadi 184 jiwa/km² pada tahun 2021. Untuk rasio jenis kelamin tidak mengalami perbedaan antara rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Aceh Utara tahun 2021 dengan tahun 2020.

1.2 PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

Pemerataan pembangunan infrastruktur daerah merupakan salah satu dari indikator pemerataan ekonomi. Kecendrungan terbentuknya pemusatan penduduk karena tidak adanya pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu persebaran penduduk di Kabupaten Aceh Utara menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Utara. Kondisi geografis Kabupaten Aceh Utara juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melihat persebaran dan kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Utara. Untuk wilayah bagian barat Kabupaten Aceh Utara berbatasan dengan Kabupaten Bireun dan untuk wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.

Persebaran penduduk dan kepadatan penduduk yang tidak merata mengakibatkan permasalahan kependudukan yang meliputi kemiskinan, pemukiman kumuh dan timbulnya pengemis serta gelandangan. Berdasarkan paparan kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Utara pada bab ini, diharapkan kebijakan pembangunan salah satunya dapat berorientasi pada pemerataan dan persebaran penduduk.

Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana umum yang disusun diharapkan dapat mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan merata baik di wilayah bagian barat, tengah dan timur Kabupaten Aceh Utara. Pemerataan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjadi induksi alami untuk menstimulasi seseorang untuk tetap berada di daerahnya dan tidak berpindah tempat ke daerah yang sudah padat penduduknya. Stimulasi alami yang dilakukan mengakibatkan tidak perlu kebijakan relokasi suatu tempat atau memindahkan sebagian penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya untuk terciptanya pemerataan penduduk.

Tabel 1.2 Jumlah dan Pesebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persebaran Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)
Sawang	39.470	6,49
Nisam	19.853	3,26
Nisam Antara	13.554	2,23
Banda Baro	7.951	1,31
Kuta Makmur	26.742	4,40
Simpang Keramat	10.049	1,65
Syamtalira Bayu	22.671	3,73
Geurdong Pase	5.631	0,93
Meura Mulia	21.306	3,50
Matangkuli	18.927	3,11
Paya Bakong	15.804	2,60
Pirak Timu	8.912	1,47
Cot Girek	20.428	3,36
Tanah Jambo Aye	44.578	7,33
Langkahan	22.591	3,71
Seunuddon	26.162	4,30
Baktiya	38.057	6,26
Baktiya Barat	19.117	3,14
Lhoksukon	50.134	8,24
Tanah Luas	25.425	4,18
Nibong	10.921	1,80
Samudera	27.326	4,49
Syamtalira Aron	19.576	3,22
Tanah Pasir	10.110	1,66
Lapang	8.864	1,46
Muara Batu	27.996	4,60
Dewantara	45.951	7,56
Aceh Utara	608.106	100

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan Tabel 1.2, ditunjukkan bahwa persebaran penduduk Kabupaten Aceh Utara masih belum merata. Dapat dilihat bahwa Penduduk di Kabupaten Aceh Utara lebih banyak tinggal di Kecamatan Lhoksukon, Dewantara, dan Tanah Jambo Aye dengan persentase sebaran penduduk masing-masing sebesar 8,24% (50.134 Jiwa), 7,56% (45.951 Jiwa), dan 7,33% (44.578 Jiwa). Adapaun untuk wilayah yang memiliki sebaran terkecil adalah kecamatan Geurdong Pase dengan sebaran penduduk hanya sebesar 0,93% (5.631 Jiwa). Kecamatan

Lhoksukon menjadi yang terbanyak karena merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang tentunya membuat banyak penduduk tertarik untuk tinggal di kecamatan ini, sedangkan Kecamatan Dewantara disebabkan karena merupakan daerah industri dan Tanah Jambo Aye merupakan pusat perdagangan di wilayah timur dari Kabupaten Aceh Utara. Selain itu, diperlukan pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kegiatan ekonomi di

Tabel 1.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah(Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sawang	39.470	384,65	103
Nisam	19.853	114,74	173
Nisam Antara	13.554	84,38	161
Banda Baro	7.951	42,35	188
Kuta Makmur	26.742	151,32	177
Simpang Keramat	10.049	79,78	126
Syamtalira Bayu	22.671	77,53	292
Geurudong Pase	5.631	269,28	21
Meura Mulia	21.306	202,57	105
Matangkuli	18.927	56,94	332
Paya Bakong	15.804	418,32	38
Pirak Timu	8.912	67,7	132
Cot Girek	20.428	189	108
Tanah Jambo Aye	44.578	162,98	274
Langkahan	22.591	150,52	150
Seunuddon	26.162	100,63	260
Baktiya	38.057	158,67	240
Baktiya Barat	19.117	83,08	230
Lhoksukon	50.134	243	206
Tanah Luas	25.425	30,64	830
Nibong	10.921	44,91	243
Samudera	27.326	43,28	631
Syamtalira Aron	19.576	28,13	696
Tanah Pasir	10.110	20,38	496
Lapang	8.864	19,27	460
Muara Batu	27.996	33,34	840
Dewantara	45.951	39,47	1164
Aceh Utara	608.106	3.296,86	184

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Utara

Kecamatan Geurudong Pase agar tercipta pembangunan ekonomi yang lebih merata di setiap daerah.

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa dari segi kepadatan penduduk, Kabupaten Aceh Utara masih belum merata. Kecamatan Dewantara merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Aceh Utara dengan 1162 jiwa/km², sedangkan kecamatan Geurudong Pase menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah dengan 21 Jiwa/Km².

1.3 KOMPOSISI PENDUDUK

Komposisi penduduk suatu daerah dapat dilihat menurut jenis kelamin. Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan dapat dilihat dengan indikator Rasio Jenis Kelamin atau *Sex Ratio* (SR). Besar kecilnya nilai rasio jenis kelamin ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantara pola mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin diatas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan dan begitupula sebaliknya. Pada Tahun 2020 *sex ratio* Kabupaten Aceh Utara bernilai 99,99, yang memiliki arti bahwa jumlah perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan cenderung sama di Kabupaten Aceh Utara.

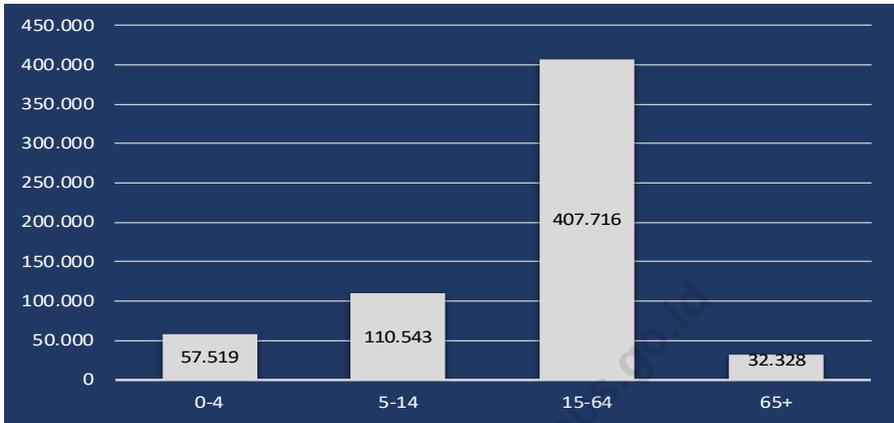
Jika dilihat dari tingkat kecamatan, pada tahun 2020 Kecamatan Simpang Keramat menjadi kecamatan dengan rasio jenis kelamin tertinggi di Kabupaten Aceh Utara dengan besaran nilai 105, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Simpang Keramat terdapat 105 Penduduk laki-laki di kecamatan tersebut. Sementara itu Kecamatan Banda Baro menjadi kecamatan dengan rasio jenis kelamin terendah dengan nilai 96. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat lebih banyak penduduk perempuan dari pada penduduk laki laki di Kecamatan Banda Baro.

Selain berdasarkan jenis kelamin, struktur dan komposisi penduduk suatu daerah juga dapat dilihat menurut kelompok umur. Komposisi penduduk berdasarkan komponen ini secara sederhana dapat mencerminkan dinamika kependudukan yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Dari Gambar 1.2, dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Aceh Utara berada pada usia angkatan kerja, yaitu pada kelompok umur 15-64 Tahun dengan jumlah 407.716 jiwa. Selain itu kelompok penduduk usia 0-4 tahun dengan jumlah populasi sebesar 57.519 jiwa lebih besar dibandingkan kelompok usia 65+ tahun yang berjumlah 32.328 Jiwa. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Aceh Utara memiliki angka kelahiran yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kelompok penduduk usia tua.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Utara, 2020

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan (Jiwa)	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sawang	19.456	19.607	39.063	99
Nisam	9.777	9.886	19.663	99
Nisam Antara	6.706	6.759	13.465	99
Banda Baro	3.878	4.048	7.926	96
Kuta Makmur	13.073	13.306	26.379	98
Simpang Keramat	5.100	4.857	9.957	105
Syamtalira Bayu	11.246	11.147	22.393	101
Geurudong Pase	2.796	2.738	5.534	102
Meura Mulia	10.371	10.653	21.024	97
Matangkuli	9.295	9.461	18.756	98
Paya Bakong	7.801	7.754	15.555	101
Pirak Timu	4.383	4.416	8.799	99
Cot Girek	10.272	10.033	20.305	102
Tanah Jambo Aye	22.209	22.013	44.222	101
Langkahan	11.295	11.223	22.518	101
Seunuddon	13.066	12.916	25.982	101
Baktiya	18.844	18.813	37.657	100
Baktiya Barat	9.516	9.464	18.980	101
Lhoksukon	24.977	24.756	49.733	101
Tanah Luas	12.495	12.698	25.193	98
Nibong	5.299	5.479	10.778	97
Samudera	13.618	13.529	27.147	101
Syamtalira Aron	9.522	9.823	19.345	97
Tanah Pasir	4.954	5.024	9.978	99
Lapang	4.331	4.475	8.806	97
Muara Batu	13.863	13.890	27.753	100
Dewantara	23.068	22.814	45.882	101
Aceh Utara	301.211	301.582	602.793	99,99

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Utara



Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Utara, 2021

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Utara

1.4 ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN

Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator kasar yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah, apakah tergolong daerah maju atau daerah berkembang. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan suatu daerah menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif (usia 0-14 Tahun) dan usia tidak produktif (usia 65 tahun keatas), sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 1.5 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Aceh Utara, 2021

Tahun	Umur			Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio)
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2021	27,64	67,05	5,32	49,15

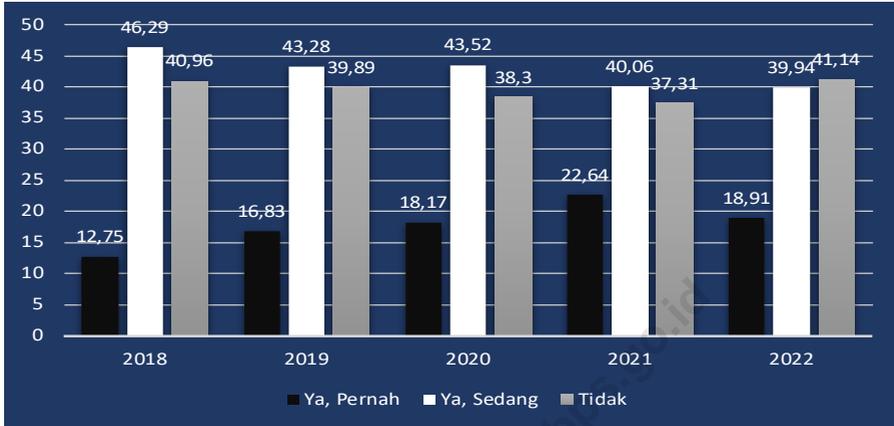
Sumber: BPS Kabupaten Aceh Utara

Pada Tabel 1.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 di Kabupaten Aceh Utara memiliki penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 27,64 persen, penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 67,05 persen, dan penduduk usia tua (65 tahun keatas) sebesar 5,32 persen. Berdasarkan komposisi penduduk pada tahun 2021 ini, menghasilkan nilai rasio ketergantungan hidup (*Total Dependency Ratio*) sebesar 49,15 persen yang memiliki arti bahwa setiap 100 orang usia produktif akan menanggung sekitar 49 sampai 50 orang usia non produktif.

1.5 KELUARGA BERENCANA

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk Program Keluarga berencana oleh pemerintah menjadikan keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah berjalan di Indonesia sejak lama dimulai pada tahun 70-an. Masyarakat dunia menanggapi program Keluarga Berencana (KB) telah berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna.

Gambaran mengenai akseptor KB di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Gambar 1.3. Berdasarkan gambar ini dapat dilihat bahwa persentase perempuan berusia 14-59 tahun yang sedang menjadi akseptor KB pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,12 persen yang pada tahun 2021 berjumlah 40,06 persen menjadi 39,94 persen pada tahun 2021. Selain itu minat perempuan pernah kawin pada usia subur di Kabupaten Aceh Utara dalam menggunakan alat/cara KB masih kurang baik, yang mana hal ini dapat dilihat dari masih tingginya persentase pada tahun 2022 yang berjumlah 41,14 persen. Kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program KB dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya seperti perspektif dan juga pengetahuan masyarakat/keluarga terhadap penggunaan masyarakat/keluarga terhadap penggunaan alat/cara KB.



Gambar 1.3 Persentase Perempuan Berumur 14-59 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara

BAB II

KESEHATAN

<https://aceh.utarakab.bps.go.id>

Indikator keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat yang meliputi kependudukan, kesehatan, pendidikan perumahan dan tingkat kemiskinan. Pada bab ini akan dibahas indikator kesehatan masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Pembahasan indikator kesehatan pada bab ini sebagian besar akan difokuskan pada angka kesakitan (keluhan sakit), persentase penolong persalinan, serta pengobatan yang ditempuh penduduk.

2.1 DERAJAT DAN STATUS KESEHATAN PENDUDUK

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Indikator Angka Kesehatan atau Morbiditas digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu dan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin tinggi derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Data keluhan kesakitan ini dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Masyarakat yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Pada Tabel 2.1 terlihat bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesakitan di Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun kebelakang. Pada tahun 2022 angka kesakitan secara keseluruhan bernilai sebesar 15,07 persen, mengalami peningkatan 4,12 persen dibandingkan tahun 2020 yang bernilai 10,95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Naik turunnya angka morbiditas dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kualitas gizi masyarakat, kualitas lingkungan perumahan, ataupun kualitas air minum yang dikonsumsi.

Pada umumnya penduduk yang mengalami gangguan kesehatan melakukan upaya pengobatan, baik dengan berobat sendiri maupun berobat

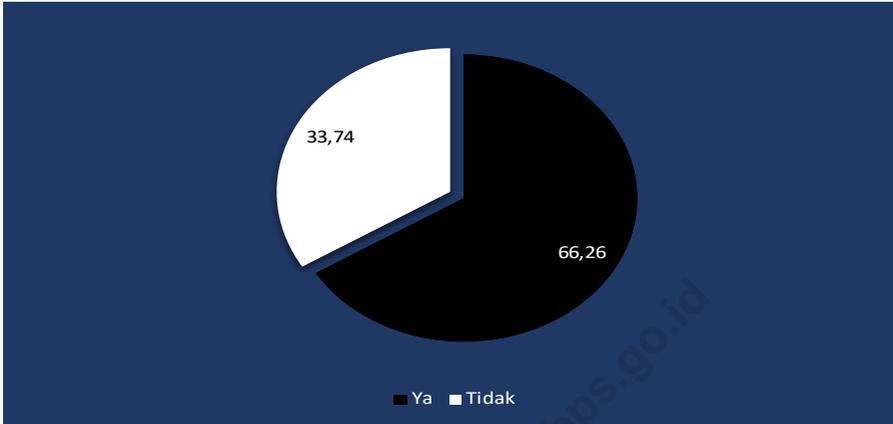
jalan. Berobat jalan adalah kegiatan atau upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Tidak termasuk dalam berobat jalan adalah konsultasi, pemeriksaan kesehatan (*check-up*), kir kesehatan (misal untuk SIM, penerimaan pegawai, kenaikan pangkat), *skrining* (pemeriksaan kesehatan untuk menemukan penyakit sedini mungkin seperti, *Pap Smear Test* untuk kanker mulut rahim dan *mantoux test* pada balita untuk *skrining* TBC), pemeriksaan kehamilan normal, dan imunisasi. Tidak masuknya hal-hal tersebut karena termasuk dalam upaya pencegahan.

Tabel 2.1 Angka Morbiditas atau Angka Kesakitan di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	14,74	16,99	15,88
2019	17,06	17,36	17,21
2020	8,24	12,28	10,29
2021	9,70	12,17	10,95
2022	13,07	17,07	15,07

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara

Jaminan kesehatan merupakan suatu hal yang cukup penting pada masa sekarang ini, mengingat biaya pengobatan yang tidaklah murah bagi banyak orang. Berdasarkan Gambar 2.1, dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk atau sekitar 66,26 persen melakukan berobat jalan menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat, sedangkan sisanya atau 33,74 persen penduduk yang berobat jalan tidak menggunakan jaminan kesehatan di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2022.



Gambar 2.1 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Saat Berobat di Kabupaten Aceh Utara 2022

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara

2.2 PENOLONG KELAHIRAN

Proses kelahiran adalah proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran (rasa mulas yang berangsur-angsur makin sering, makin lama dan makin kuat, rahim terasa kencang, keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir (vagina), keluarnya cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari jalan lahir dan merasa seperti mau buang air besar bila bayi akan lahir), hingga lahirnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluarnya plasenta. Seorang ibu yang melahirkan bisa ditolong oleh lebih dari satu jenis penolong (misalnya dukun bersalin dan bidan). Kelahiran adalah ketika lahirnya janin berusia 5 bulan (22 minggu) ke atas, bila lahirnya janin kurang dari 5 bulan dinamakan abortus/keguguran.

Pada Tabel 2.2, ditunjukkan bahwa pada tahun 2022 penolong persalinan tertinggi di Kabupaten Aceh Utara adalah dengan dibantu oleh bidan sebesar 82,96 persen. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 22,47 persen dibandingkan tahun 2019. Penolong kelahiran tertinggi kedua adalah dengan dokter kandungan dengan jumlah 13,13 persen, yang mana mengalami penurunan sebesar 19,83 persen dibandingkan dengan tahun 2019.

Meskipun persentase penolong kelahiran dengan bantuan tenaga medis sudah sangat tinggi, namun pada tahun 2022 ini masih terdapat penolong persalinan dengan bantuan bukan tenaga kesehatan, yaitu lainnya dengan besaran nilai 2,23 persen. Dengan semakin banyaknya tenaga kesehatan yang

membantu dalam proses persalinan akan menurunkan angka kematian bayi di suatu daerah termasuk Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 14-59 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022

Penolong Persalinan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dokter Kandungan	25,49	20,55	32,96	-	13,13
Dokter Umum	2,27	0	3,25	-	1,68
Bidan	70,3	76,64	60,49	-	82,96
Perawat	0	1,13	1,07	-	0
Dukun Beranak	1,95	0	2,23	-	0
Lainnya	0	1,69	0	-	2,23

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara

2.3 BERAT BADAN BAYI DAN TEMPAT MELAHIRKANNYA

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pada persentase penduduk perempuan yang berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir dengan berat badan bayi kurang dari 2,5 kg pada periode waktu 2020 hingga 2022 yang bernilai 18,18 persen pada tahun 2022. Sedangkan untuk bayi dengan berat badan lebih dari 2,5 kg memiliki tren yang positif pada periode waktu tersebut dengan nilai 79,75 persen pada tahun 2022. Disisi lain, naik turunnya persentase ini juga diikuti dengan fluktuasi tanggapan tidak tahu/tidak ditimbang yang dihasilkan.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Berat Badan Bayi di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022

Berat Badan Bayi	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<2,5 kg	16,13	24,15	25,66	23,27	18,18
>2,5 kg	76,5	67,66	72,89	75,83	79,75
Tidak Ditimbang/Tidak Tahu	7,37	8,20	1,45	0,80	2,06

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara

Dari Tabel 2.4 dapat dilihat bahwa rumah bersalin/klinik menjadi tempat dengan persentase terbesar wanita berumur 15-49 tahun berdasarkan tempat kelahirannya dengan 41,54 persen di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2022. Diposisi berikutnya ada praktek nakes yang menjadi tempat melahirkan terbesar kedua dengan persentase sebesar 20,83 persen. Baik dari rumah bersalin/klinik dan praktek nakes mengalami peningkatan dan tren yang positif pada periode waktu 2018-2022. Hal ini menggambarkan semakin tingginya tingkat keperdulian masyarakat akan tempat mereka melahirkan yang mana akan berpengaruh kepada semakin rendahnya angka kematian bayi nantinya di Kabupaten Aceh Utara.

Selain itu, masih ada wanita yang melakukan proses kelahiran di rumah pada tahun 2022 dengan persentase sebesar 7,44 persen. Salah satu penyebab masih terjadinya hal ini adalah karena faktor ekonomi dan pengalaman ART dalam menangani persalinan. Akan tetapi, angka tempat melahirkan di rumah ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan memiliki trend negatif pada periode waktu 2018-2022

Tabel 2.4 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Tempat Melahirkan di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022

Tempat Melahirkan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Rumah Sakit	27,41	24,36	35,52	-	17,30
Rumah Bersalin/ Klinik	23,42	33,05	30,52	-	41,54
Puskemas	1,60	1,73	5,14	-	5,5
Pustu	5,30	1,37	0	-	0
Praktek Nakes	13,77	15,24	19,43	-	20,83
Polindes/Poskesdes	2,47	3,45	2,66	-	0,52
Rumah	23,64	20,80	6,74	-	7,44
Lainnya	2,38	0	0	-	6,86

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara

BAB III

PENDIDIKAN

<https://aceh.utarakab.bps.go.id>

Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan daerah dilihat dari aspek sumber daya manusia. Oleh karena itu pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non-formal.

Fokus pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah, misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum, bahkan sejak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang merupakan kelanjutan dari Program Wajib Belajar 6 Tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk dimasa mendatang.

Pendidikan pada akhirnya akan menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang, memindahkan ilmu pengetahuan, memindahkan nilai-nilai yang bertujuan memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat, untuk memberantas kebodohan, menghilangkan salah pengertian, memberi bimbingan dalam hidup, menolong dalam menghadapi kesukaran, menyejahterakan penduduk dan menentramkan batin.

Pada bab ini akan dibahas indikator pendidikan yang meliputi Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dalam dua subbab yaitu tingkat pendidikan dan partisipasi sekolah.

3.1 TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan dasar memiliki fokus utama dalam memberantas buta huruf. Pemberantasan buta huruf menjadi indikator yang mendasar dalam keberhasilan proses pendidikan. Indikator keberhasilan pemberantasan buta huruf dapat dicerminkan dari angka melek huruf. Angka melek huruf sendiri adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf latin lainnya serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidup sehari-hari.

Angka melek huruf kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah serta melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena

membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Selain itu Angka Melek Huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Utara, 2016 - 2020

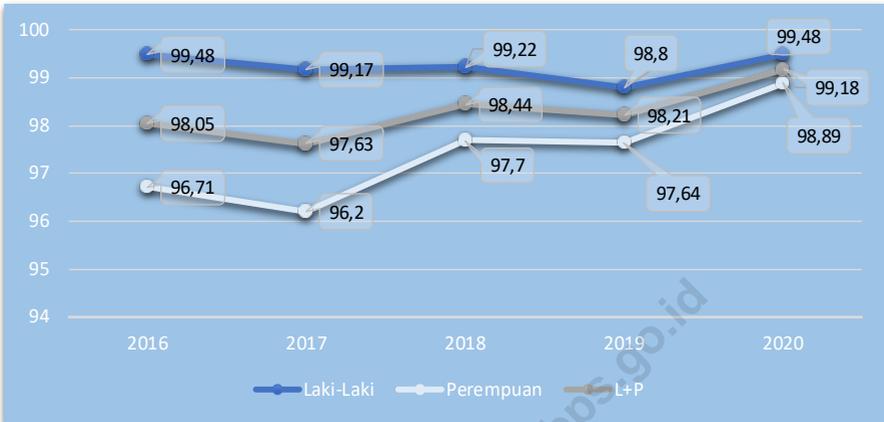
Tahun	Laki-Laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	99,48	96,71	98,05
2017	99,17	96,20	97,63
2018	99,22	97,70	98,44
2019	98,80	97,64	98,21
2020	99,48	98,89	99,18

Sumber: *Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara*

Berdasarkan Tabel 3.1, dapat dilihat bahwa nilai Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Utara secara total pada tahun 2020 bernilai 99,18 persen. Nilai ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 98,21 persen. Selain itu, nilai Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan dan tren positif pada periode waktu 2016-2020.

Semakin tinggi nilai Angka Melek Huruf suatu daerah menggambarkan bahwa semakin tingginya penduduk berumur 15 tahun keatas yang mampu untuk membaca dan menulis serta dapat memahami kalimat sederhana. Semakin baiknya nilai angka ini menggambarkan efektifitas pelaksanaan program pendidikan dasar di suatu daerah berjalan efektif, termasuk di Kabupaten Aceh Utara saat ini

Pada gambar 3.1 ditunjukkan Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Utara untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat Angka Melek Huruf laki-laki cenderung selalu lebih tinggi daripada perempuan. Pada tahun 2020 sendiri, angka melek huruf laki-laki bernilai 99,48 persen dan untuk perempuan bernilai 98,89 persen. Meski demikian Angka Melek Huruf perempuan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan memiliki trend yang positif di sepanjang tahun 2016-2020, yang cukup memangkas gap antara Angka Melek Huruf laki-laki dengan perempuan.



Gambar 3.1 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Utara, 2016-2020

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara

Semakin besar persentase penduduk yang tamat di jenjang pendidikan tertinggi di suatu daerah maka pendidikan di daerah tersebut dapat dikatakan semakin berhasil dan menghasilkan penduduk dengan lebih berkualitas dari segini pendidikan. Pada Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa terjadi trend positif atau peningkatan pada lulusan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu pada perguruan tinggi, SLTA sederajat, dan SLTP sederajat di sepanjang tahun 2018-2022. Hal ini tentunya diikuti dengan penurunan dan tren negatif pada penduduk yang hanya lulusan SD sederajat atau belum/tidak tamat SD. Pada tahun 2022, terdapat 67,85 persen penduduk Kabupaten Aceh Utara yang telah menyelesaikan pendidikan SLTP keatas yang mana hal ini berarti sudah lebih dari separuh penduduk Kabupaten Aceh Utara yang sudah sesuai dengan “Program Wajib Belajar 9 Tahun”

Selama lima tahun terakhir persentase yang memenuhi pendidikan wajib belajar 9 tahun terbesar terjadi pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah melakukan tindakan dan upaya khusus untuk meningkatkan partisipasi penduduk dalam mengenyam pendidikan hingga setinggi mungkin serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya pendidikan dalam upaya meningkatkan pengetahuan, kualitas hidup, dan tentunya sumber daya manusia.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022

Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belum/Tidak Tamat SD	13,28	9,76	7,03	10,42	10,01
SD Sederajat	30,47	28,25	27,28	22,88	22,14
SLTP Sederajat	24,13	24,89	25,38	27,07	26,53
SLTA Sederajat	25,15	30,14	32,44	31,29	31,36
Perguruan Tinggi	6,98	6,96	7,88	8,34	9,96

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara

3.2 TINGKAT PARTISIPASI SEKOLAH

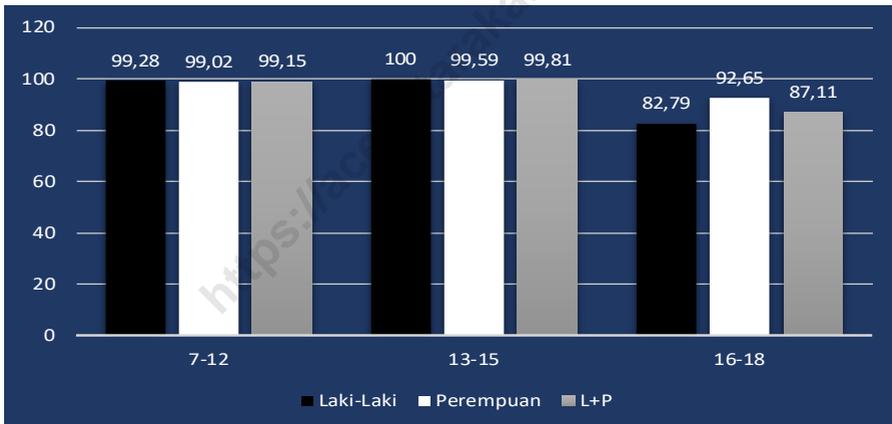
Tingkat partisipasi sekolah (persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu) digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada. Meningkatnya angka tingkat partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022

Usia Sekolah	Jenis Kelamin	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7-12	Laki-Laki	100	98,99	100	99,62	99,28
	Perempuan	99,3	99,5	99,98	100	99,02
	L+P	99,64	99,24	99,99	99,8	99,15
13-15	Laki-Laki	97,46	95,86	98,11	96,92	100
	Perempuan	97,71	100	98,64	100	99,59
	L+P	97,6	97,99	98,38	98,49	99,81
16-18	Laki-Laki	79,11	83,67	82,34	79,68	82,79
	Perempuan	80,42	73,89	77,38	79,31	92,65
	L+P	79,73	78,62	79,84	79,5	87,11

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara

Pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa nilai APS setiap kelompok usia (jenjang usia) berbeda-beda. Nilai APS kelompok usia 16-18 lebih rendah daripada kelompok usia lainnya. Hal ini terjadi karena semakin bertambah usia semakin besar kemungkinan seseorang untuk berhenti sekolah (putus sekolah). Sementara itu APS menurut jenis kelamin juga mengalami perbedaan. Perbedaan ini sendiri tidak terlaui mengarah ke satu jenis kelamin yang lebih tinggi setiap tahunnya, namun antara jenis kelamin setiap tahun terkadang saling bertukar posisi menjadi yang lebih tinggi di setiap kelompok usia, baik itu kelompok usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Pada tahun 2022 nilai APS perempuan lebih rendah daripada APS laki laki di kelompok usia 13-15 tahun dengan besaran 99,59 persen dibandingkan APS laki laki yang berjumlah 100 persen. Pada kelompok usia 16-18 tahun, APS laki-laki lebih rendah daripada perempuan dengan besaran 82,79 dibandingkan APS perempuan yang berjumlah 92,65 persen di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022.



Gambar 3.2 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Aceh Utara, 2022

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara

Selain APS, untuk melihat gambaran penduduk suatu wilayah juga dapat digunakan pendekatan melalui Angka Partisipasi Murni (APM). APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM dapat dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD (usia 7-12 Tahun), SLTP (usia 13-15 tahun) dan SLTA (usia 16-18 tahun). Karena pada saat ini pemerintah telah menerapkan program wajib belajar sembilan tahun, maka sasaran dari program tersebut adalah anak pada kelompok jenjang pendidikan SD dan SLTP.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022

Usia Sekolah	Jenis Kelamin	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	Laki-Laki	98,42	97,49	97,16	97,64	99,28
	Perempuan	97,70	97,37	99,06	98,17	99,02
	L+P	98,05	97,43	98,05	97,90	99,15
SMP	Laki-Laki	91,00	81,54	88,36	83,35	90,93
	Perempuan	82,55	89,58	84,35	89,27	80,88
	L+P	86,39	85,68	86,34	86,37	86,10
SMA	Laki-Laki	59,50	61,66	59,63	66,49	60,18
	Perempuan	65,77	63,54	66,06	57,87	80,80
	L+P	62,46	62,63	62,87	62,38	69,21

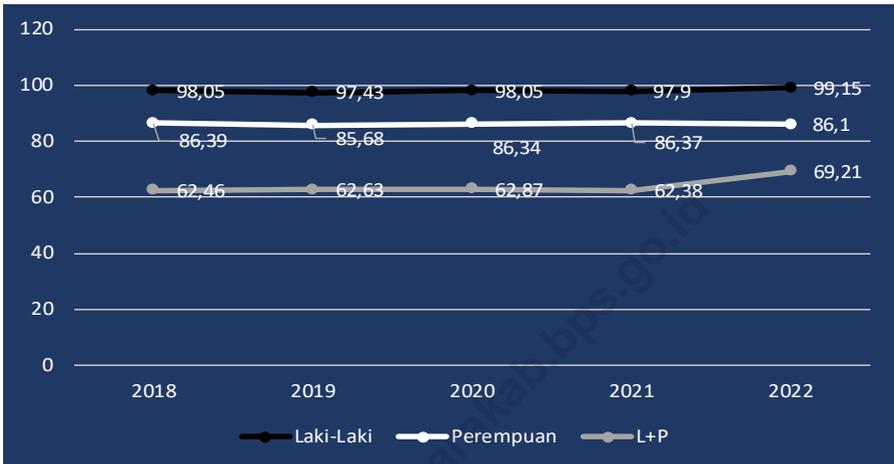
Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa APM SD pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,25 persen dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah sebesar 97,90 persen. APM SD di Kabupaten Aceh Utara mengalami fluktuasi dan memiliki trend positif untuk APM laki-laki, perempuan, dan secara total pada periode waktu 2018-2022. APM SD tertinggi sendiri terjadi pada tahun 2022 dengan besaran 99,15 persen.

Untuk APM SMP juga mengalami fluktuasi dari tahun 2018 ke tahun 2022 baik dari untuk APM SMP laki-laki, perempuan, maupun secara keseluruhan. APM SMP tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan besaran 86,39 persen.

Pada APM SMA juga mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2022. Nilai APM SMA tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan besaran 69,21 persen. Nilai APM SMA laki-laki disebagian besar tahun bernilai lebih rendah daripada APM SMA perempuan, yang berarti nilai APM SMA laki-laki lebih rendah daripada APM SMA perempuan. Hal menunjukkan bahwa proporsi anak laki-laki sekolah tepat waktu untuk jenjang SMA lebih rendah daripada proporsi anak perempuan.

Nilai APM SMP dan SMA memang tidak lebih besar daripada APM SD yang mana hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang sekolah maka semakin rendah proporsi anak yang sekolah tepat waktu. Indikasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat anak yang lulus SD, tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP dan begitu juga anak yang lulus SMP namun tidak melanjutkan ke SMA.



Gambar 3.3 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Sekolah di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara



BAB IV

KETENAGAKERJAAN

<https://aceh.utarakab.bps.go.id>

Perkembangan perubahan demografi suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan perubahan usia produktif dan usia non produktif. Hal tersebut berdampak pada ketersediaannya lapangan pekerjaan dan tingkat kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dampak negatif dari pemerintah daerah yang kurang peka terhadap ledakan penduduk usia produktif akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran di wilayah tersebut lebih dari biasanya.

Ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi solusi dalam menghadapi ledakan usia produktif atau bonus demografi yang akan dihadapi oleh suatu wilayah. Gambaran mengenai ketenagakerjaan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan dibidang ketenagakerjaan. Pada bab ini akan dibahas terkait angkatan kerja dan bukan angkatan kerja serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran.

4.1 ANGKATAN KERJA DAN BUKAN ANGKATAN KERJA

Indikator ketenagakerjaan dihitung dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dikumpulkan setiap semester. Survei ini melihat berapa persen penduduk yang berada di angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah Penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Dari persentase jumlah angkatan kerja ini kita dapat mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Sebaliknya untuk bukan angkatan kerja adalah jumlah penduduk diatas 15 tahun atau lebih yang tidak bekerja dan bukan pengangguran.

Dari Tabel 4.1 dapat diperoleh informasi keadaan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kabupaten Aceh Utara selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 penduduk angkatan kerja atau penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang bekerja dan mencari pekerjaan berjumlah 267.235 jiwa atau 60,31 persen. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 6.514 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang memiliki kegiatan seminggu yang lalu bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Pada tahun 2020 jumlah penduduk bukan angkatan kerja di Kabupaten Aceh Utara berjumlah 175.868 jiwa atau 39,69 persen, yang mana mengalami peningkatan sebesar 11.876 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel 4.1 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2020

Kegiatan Utama	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	265.708	260.721	267.235
Bekerja	238.670	238.229	244.358
Pengangguran Terbuka	27.038	22.492	22.877
Bukan Angkatan Kerja	152.326	163.992	175.868
Sekolah	48.988	53.610	45.707
Mengurus Rumah Tangga	91.843	95.882	98.556
Lainnya	11.495	14.500	31.605
Penduduk Usia Kerja	418.034	424.713	443.103

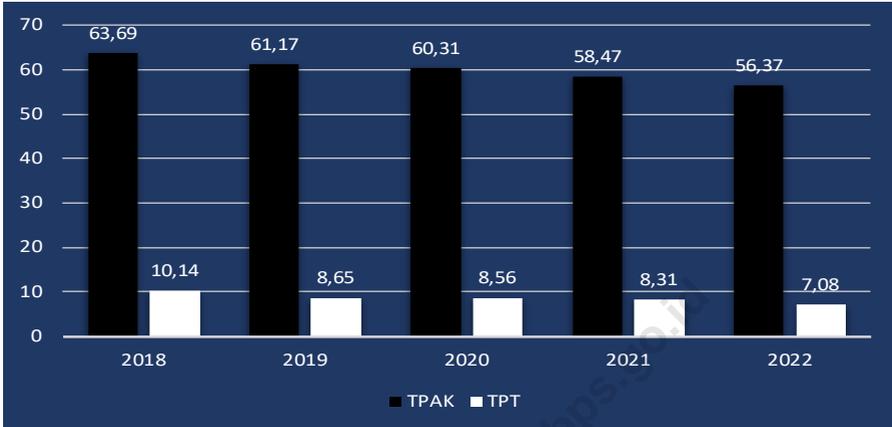
Sumber: Sakernas, BPS Kabupaten Aceh Utara

4.2 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Persentase ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.

Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Persentase ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Berdasarkan SAKERNAS 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2022 bernilai 56,37 persen. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 56,37 persen dari seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) yang berkontribusi aktif dalam perekonomian Kabupaten Aceh Utara. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,10 persen dan memiliki trend negatif dari tahun 2018-2022.



Gambar 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022

Sumber: Sakernas, BPS Kabupaten Aceh Utara

Dari Tabel 4.2 dibawah, dapat dilihat bahwa angka TPT Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2022 bernilai 7,08 persen. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai 8,31 persen. Selain itu jika dilihat dari tahun 2018-2022, terjadi penurunan dan juga trend negatif untuk nilai TPT Kabupaten Aceh Utara di periode waktu tersebut.

Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022

Indikator Ketenagakerjaan	Tahun	Nilai
(1)	(2)	(3)
TPAK	2018	63,39
	2019	61,17
	2020	60,31
	2021	58,47
	2022	56,37
TPT	2018	10,14
	2019	8,65
	2020	8,56
	2021	8,31
	2022	7,08

Sumber: Sakernas, BPS Kabupaten Aceh Utara

Angka TPAK dan TPT Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2022 masing-masing bernilai 56,37 persen dan 7,08 persen. Nilai ini memiliki arti bahwa setiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) terdapat 56-57 pekerja aktif dalam perekonomian dan 7-8 orang yang merupakan penangguran.

<https://acehutarakab.bps.go.id>

BAB V

PERUMAHAN

<https://aceh.utarakab.bps.go.id>

Kebutuhan pokok setiap individu meliputi kebutuhan akan pangan, sandang dan papan. Dalam hal ini kebutuhan papan adalah kebutuhan akan tempat tinggal dimana setiap individu dapat berindung dari buruknya cuaca dan hewan buas. Sehingga kelayakan tempat tinggal menjadi indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan rakyat suatu daerah. Tempat tinggal merujuk pada kerangka kerja keseluruhan dari kehidupan pribadi suatu rumah tangga yang dilihat berdasarkan tiga komponen, yaitu perumahan, pelayanan dan lingkungan. Indikator perumahan mencakup jenis bangunan (ukuran dan jenis material/bahan bangunan), kepemilikan tempat tinggal (sewa atau milik sendiri), dan perlengkapan rumah tangga. Sedangkan lingkungan mencakup sanitasi, tingkat isolasi (ketersediaan jalan yang dapat digunakan setiap saat, lamanya waktu tempuh, dan tersedianya transportasi ke tempat kerja) dan tingkat keamanan personal.

5.1 KEPEMILIKAN TEMPAT TINGGAL

Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dalam hal perumahan dan permukiman. Pemerintah selama ini telah berupaya untuk mengembangkan suatu kebijakan penyediaan rumah sederhana dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, misalnya saja melalui program Rumah Susun, kemudahan dalam pengambilan Kredit Perumahan Rakyat (KPR), dan lain sebagainya. Hal ini terutama dengan memperhatikan kemampuan masyarakat golongan berpendapatan rendah.

Tabel 5.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022

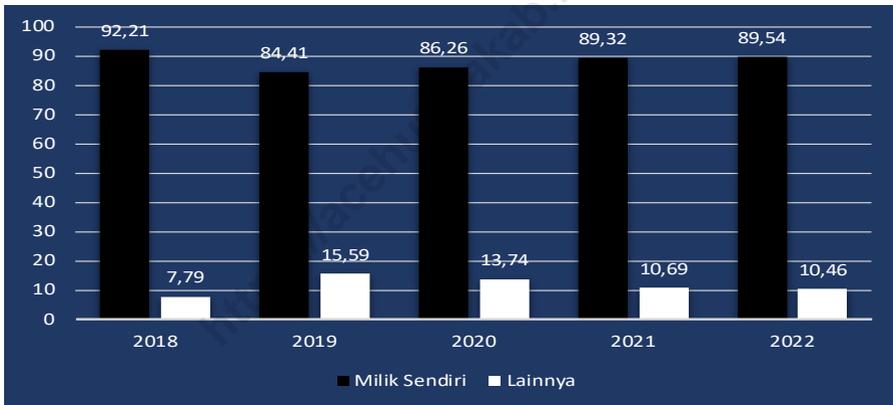
Status Kepemilikan Tempat Tinggal	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Milik Sendiri	92,21	84,41	86,26	89,32	89,54
Kontrak/Sewa	1,73	1,51	2,66	2,03	1,42
Bebas Sewa	5,81	12,45	10,48	6,79	7,56
Dinas	0,25	1,26	0,6	1,87	1,48
Lainnya	0	0,38	0	0	0

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara

Pada Tabel 5.1 menunjukkan bahwa terdapat perubahan dalam persentase kepemilikan tempat tinggal pada tahun 2022 dengan tahun-tahun

sebelumnya. Pada tahun 2022 status kepemilikan rumah “milik sendiri” tetap menjadi persentase terbesar dengan jumlah 89,54 persen. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,22 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2021. Persentase terbesar pada status kepemilikan rumah milik sendiri terjadi pada tahun 2018 dengan persentase 92,21 persen pada periode waktu 2018-2022.

Status kepemilikan tempat tinggal terbesar kedua di Kabupaten Aceh Utara adalah status kepemilikan “bebas sewa” dengan persentase 7,56 persen pada di tahun 2022. Kemudian terdapat juga status kepemilikan “kontrak/sewa” dengan persentase 1,42 persen pada tahun 2022. Status kepemilikan kontrak/sewa cenderung mengalami fluktuasi selama periode waktu 2018-2022. Adapun untuk status kepemilikan “dinas” memiliki persentase sebesar 1,48 persen pada tahun 2022.



Gambar 5.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Tempat Tinggal Milik Sendiri di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara

5.2 KUALITAS TEMPAT TINGGAL

Perumahan merupakan tempat untuk tumbuh, hidup, berinteraksi, berlindung dari gangguan, dan fungsi lainnya bagi penghuninya. Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bagi kesejahteraan pemilikinya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumah tangga yang menempati rumah tersebut. Indikator fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut antara lain dapat dilihat dari jenis atap, jenis dinding, jenis dan luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang

air besar rumah tangga dan juga tempat penampungan kotoran akhir.

Kondisi kesehatan perumahan yang buruk sangat berperan sebagai media penularan penyakit diantara anggota keluarga atau tetangga sekitarnya. Salah satu ukuran kesehatan perumahan layak huni diantaranya adalah jenis bangunan seperti kualitas lantai, dinding dan atap rumah. Ketiga hal tersebut selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan). Salah satu ukuran kesehatan perumahan lainnya selain ketiga kriteria tersebut ada juga kriteria yang erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk tiap anggota keluarga. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai 10 m² per orang.

Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin baik tingkat kesejahteraan penduduknya. Selain itu, jenis lantai juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Semakin banyak rumah tangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Karena lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacangan dan penyakit kulit.

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah untuk ditinggali serta menentukan kualitas suatu rumah. Fasilitas pokok lainnya yang penting agar suatu rumah akan menentukan nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih, serta fasilitas jamban sendiri.

Tabel 5.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022

Jenis Penerangan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Listrik PLN	100	98,88	100	99,86	99,56
Listrik non PLN	0	1,12	0	0	0
Bukan Listrik	0	0	0	0,14	0,44

Sumber: *Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara*

Dari Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terdapat 99,56 persen penduduk Kabupaten Aceh Utara tercatat menggunakan jenis penerangan listrik dari PLN. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada penduduk Kabupaten Aceh Utara yang tidak menggunakan Listrik dari PLN sebagai jenis penerangan di kediaman mereka sehari-hari. Pada beberapa tahun sebelumnya masih terdapat sebagian kecil penduduk yang menggunakan listrik non PLN dan

bukan listrik sebagai sumber penerangan utama rumah mereka masing-masing di Kabupaten Aceh Utara. Seperti pada tahun 2022 dimana persentase sumber penerangan menggunakan bukan listrik berjumlah 0,44 persen.

Tabel 5.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022

Sumber Air Minum	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Air Kemasan Bermerk/Isi Ulang	21,33	26,79	25,43	18,56	18,50
Leding	10,96	10,45	11,58	14,33	15,91
Sumur Bor/Pompa	6,64	5,43	7,97	9,32	8,26
Sumur Terlindung/Tak Terlindung	58,81	51,55	51,93	50,52	56,04
Mata Air Terlindung/Tak Terlindung	0,0	1,66	0,35	4,30	0,83
Lainnya	2,27	4,12	2,74	2,97	0,46

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara

Fasilitas sumber air minum yang bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting. Pada Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa sumber air minum sumur terlindung/tak terlindung menjadi sumber air minum dengan penggunaan terbesar di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2022 dengan persentase 56,04 persen. Di seluruh variabel sumber air minum cenderung mengalami fluktuasi pada periode waktu 2018-2022. Sumber air minum terbesar kedua pada tahun 2022 adalah sumber air minum air kemasan bermerk/isi ulang dengan persentase sebesar 18,50 persen yang diikuti oleh air leding pada posisi ketiga sebesar 15,91 persen.

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan dengan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan dan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana fasilitasnya, terutama kepemilikan fasilitas rumah tempat tinggal berupa jamban.

Dari Tabel 5.4 digambarkan persentase rumah tangga dengan kepemilikan jamban mereka, apakah jamban tersebut milik sendiri, digunakan bersama-sama, MCK umum, ada tapi tidak digunakan, atau tidak memiliki fasilitas jamban sama sekali. Pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dan memang digunakan oleh ART itu sendiri adalah sebesar 82,66 persen

yang membuat menjadi persentase terbesar diantara jenis fasilitas lainnya. Persentase kedua terbesar adalah tidak memiliki fasilitas sebesar 10,20 persen pada tahun 2022. Adapun untuk jenis fasilitas air buang besar lainnya adalah ada tapi digunakan bersama ART rumah tangga tertentu dan ada, di mck umum/ siapapun menggunakan memiliki masing-masing persentase sebesar 5,36 persen dan 1,78 persen.

Tabel 5.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022

Jenis Fasilitas Tempat Buang Air Besar	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ada, digunakan Hanya ART Sendiri	63,87	64,47	62,12	81,99	82,66
Ada, digunakan Bersama ART Rumah Tangga Tertentu	7,33	9,57	23,97	5,45	5,36
Ada, di MCK Umum/Siapapun Menggunakan	2,89	2,23	3,62	1,76	1,78
Ada, ART Tidak Menggunakan	0	0,15	0,16	0	0
Tidak Ada Fasilitas	25,91	23,28	10,14	10,80	10,20

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara

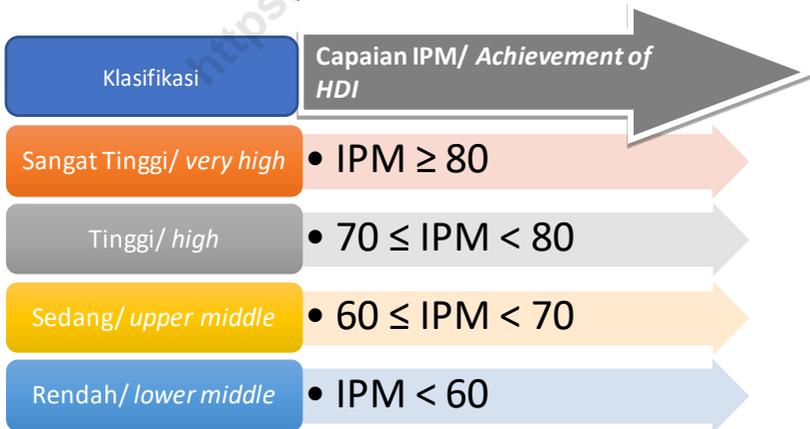
BAB VI

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

<https://acehvtarakab.bps.go.id>

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang meliputi kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup yang layak. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Data yang digunakan untuk penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Utara adalah data primer yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) semesteran yang dilakukan setiap tahun.

Perkembangan status IPM daerah kabupaten/kota dapat dilihat melalui pengelompokan tingkatan status Pembangunan Manusia yang dapat dikelompokkan atas 4 kriteria. Perubahan kriteria ini dilakukan dengan mengelompokkan status IPM tingkatan menengah atau sedang menjadi 2 (dua) yaitu menengah bawah dan menengah atas. Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah berarti menunjukkan kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketertinggalannya. Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria menengah, maka hal ini juga menunjukkan bahwa pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. Jika daerah tersebut telah memiliki status pembangunan manusia tinggi, berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik atau optimal.



Gambar 6.1 Klasifikasi Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sumber: *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021*

Tabel 6.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Peringkatnya dalam Provinsi Aceh menurut Kabupaten/Kota, 2017-2021

Kode	Kabupaten/ Kota	IPM					Rank IPM				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1101	Simeulue	64,74	65,70	66,03	66,41	67,27	22	22	22	22	22
1102	Aceh Singkil	68,02	68,91	68,94	69,22	69,62	17	17	17	17	17
1103	Aceh Selatan	65,92	66,90	67,12	67,44	67,87	19	19	20	20	20
1104	Aceh Tenggara	68,67	69,36	69,37	69,44	70,32	13	13	13	15	14
1105	Aceh Timur	66,82	67,39	67,63	67,83	68,72	18	18	18	18	18
1106	Aceh Tengah	72,64	73,14	73,24	73,37	73,95	6	6	6	7	7
1107	Aceh Barat	70,47	71,22	71,38	71,67	72,34	10	10	10	10	10
1108	Aceh Besar	72,73	73,55	73,56	73,58	74,00	5	5	5	6	6
1109	Pidie	69,93	70,41	70,63	70,70	71,20	11	11	11	11	11
1110	Bireuen	71,37	72,27	72,28	72,33	73,16	9	9	9	9	9
1111	Aceh Utara	68,36	69,22	69,33	69,46	70,22	15	15	14	14	15
1112	Aceh Barat Daya	65,67	66,56	66,75	66,99	67,41	21	21	21	21	21
1113	Gayo Lues	65,88	66,87	67,22	67,56	68,25	20	20	19	19	19
1114	Aceh Tamiang	68,45	69,23	69,24	69,48	70,43	14	14	15	13	12
1115	Nagan Raya	68,15	69,11	69,18	69,31	70,10	16	16	16	16	17
1116	Aceh Jaya	68,83	69,74	69,75	69,84	70,36	12	12	12	12	13
1117	Bener Meriah	72,14	72,97	72,98	73,27	73,90	7	7	8	8	8
1118	Pidie Jaya	72,12	72,87	73,20	73,60	74,34	8	8	7	5	5
1171	Kota Banda Aceh	84,37	85,07	85,41	85,71	86,28	1	1	1	1	1
1172	Kota Sabang	74,82	75,77	75,78	76,11	76,85	4	4	4	4	4
1173	Kota Langsa	76,34	77,16	77,17	77,44	77,82	3	3	3	3	3
1174	Kota Lhokseumawe	76,62	77,30	77,31	77,57	78,04	2	2	2	2	2
1175	Kota Subulussalam	63,48	64,46	64,93	65,27	66,20	23	23	23	23	23
1100	Aceh	71,19	71,90	71,99	72,18		11	11	11	12	12

Sumber: *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022*

Berdasarkan Tabel 6.1 dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir (2018-2022) Kabupaten Aceh Utara nilai IPM Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan namun dalam segi peringkat cenderung berada pada posisi ke-14 dan ke-15 di Provinsi Aceh. Pada tahun 2022 nilai IPM Kabupaten Aceh Utara bernilai 70,22 dengan peringkat pada posisi ke-15. Angka IPM Kabupaten Aceh Utara termasuk dalam rentang 70 s.d 80 yang membuat Kabupaten Aceh Utara termasuk dalam daerah yang memiliki status pembangunan manusia sedang. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan di Kabupaten Aceh Utara dalam kategori tinggi.

Perkembangan nilai IPM suatu daerah setiap tahunnya sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen penyusunnya. Kemajuan IPM ini sangat bergantung pada komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Tabel 6.2 Perkembangan Komponen Penyusun IPM di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Harapan Hidup	68,61	68,79	68,8	68,81	69,01
Harapan Lama Sekolah	14,68	14,69	14,7	14,71	14,73
Rata-Rata Lama Sekolah	8,11	8,46	8,63	8,64	8,73
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan*	7.919	8.189	8.122	8.201	8.620

*dalam ribu rupiah dalam setahun

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 6.2, dapat juga dilihat pada tahun 2018-2022 komponen penyusunan IPM Kabupaten Aceh Utara juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dan memiliki trend positif selama periode tabel tersebut. Pada komponen Umur Harapan Hidup (UHH) memiliki nilai 69,01 pada tahun 2022, yang berarti secara rata-rata penduduk Kabupaten Aceh Utara akan memiliki umur tertinggi di usia 69-70 tahun pada Tahun 2022. Selain UHH, terdapat juga indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) yang merupakan indikator lamanya sekolah yang ditempuh oleh anak usia 7 tahun keatas. Indikator ini mengukur keberhasilan pemerintah dalam meluncurkan program wajib belajar. Kabupaten Aceh Utara sendiri pada tahun 2022 memiliki angka HLS sebesar 14,73 tahun. Nilai ini memiliki arti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Aceh Utara yang berusia 7 tahun keatas memiliki harapan untuk mengikuti proses pendidikan sekolah sampai jenjang pendidikan sekolah tingkat Diploma II atau Diploma III. Sementara itu untuk komponen Rata-Rata Lama sekolah (RLS) menggambarkan

jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formalnya. Penduduk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2022 memiliki angka RLS sebesar 8,73 pada. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Aceh Utara yang telah berusia 25 tahun keatas, telah menjalani pendidikan formal selama 8,73 tahun atau dengan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan setingkat sekolah dasar (SD).



Gambar 6.2 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita dan Laju Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan di Kabupaten Aceh Utara, 2018-2022

Sumber: *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022*

Indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah pengeluaran per penduduk yang dikeluarkan dengan paritas daya beli. Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang memiliki trend positif selama periode waktu 2018-2022. Semakin tinggi tingkat pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Aceh Utara menandakan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Pada tahun 2022 sendiri pengeluaran perkapita Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari terjadinya peningkatan dalam laju pengeluaran perkapita sebesar 5,11 persen.

BAB VII

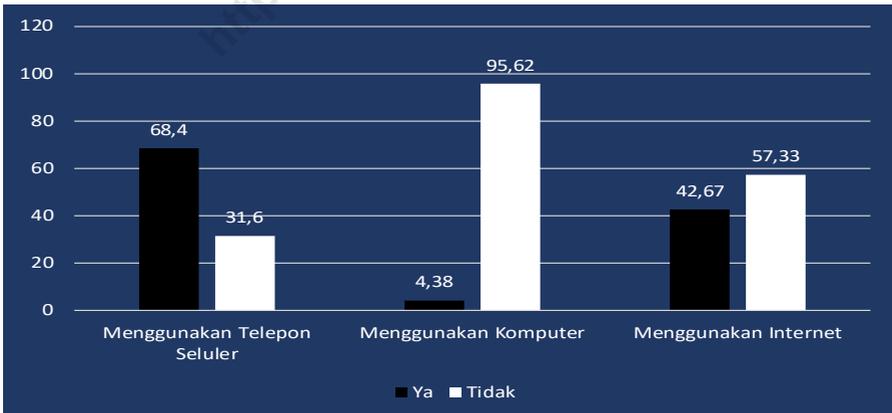
SOSIAL LAINNYA

<https://aceh.utarakab.bps.go.id>

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya dari perjalanan atau bepergian serta kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Perjalanan serta kepemilikan alat komunikasi dan informasi menunjukkan kecenderungan kemampuan pemenuhan kebutuhan tersier masyarakat. Banyak masyarakat memanfaatkan waktu luang mereka untuk melakukan sebuah perjalanan, dimana semakin sering melakukan perjalanan mengindikasikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang dimiliki oleh masyarakat karena waktu yang digunakan tidak hanya untuk mencari nafkah saja. Begitu juga dengan kepemilikan alat komunikasi dan informasi masyarakat. Semakin sejahtera, gaya hidup rumah tangga cenderung akan berubah menjadi lebih modern. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis.

7.1 KEPEMILIKAN ALAT DAN AKSES INFORMASI KOMUNIKASI

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari aspek lain seperti kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Perubahan gaya hidup modern mendorong kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan komunikasi. Pemenuhan kebutuhan tersebut juga didorong oleh banyaknya ragam jenis akses media informasi yang ditawarkan pada masyarakat. Rumah tangga yang memiliki/menggunakan alat komunikasi dan informasi dianggap lebih sejahtera. Semakin besar persentase penduduk yang menggunakan alat komunikasi dan informasi diasumsikan memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi.



Gambar 7.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Penggunaan Teknologi Informasi (Telepon, Komputer, dan Internet) di Kabupaten Aceh Utara, 2022

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara

Kehidupan sekarang ini perlahan-lahan mulai berubah dari yang dulunya era industri 1.0 menuju industri 4.0 yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan internet dan kecerdasan buatan. Fasilitas internet memberikan kemudahan dalam memperoleh data dan informasi tanpa kendala ruang dan waktu. Pada Gambar 7.1 diperlihatkan penduduk diatas 5 tahun yang menggunakan telepon seluler, komputer, dan juga internet di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2022. Penduduk Aceh Utara yang menggunakan telepon seluler untuk penduduk yang berumur 5 tahun keatas pada tahun 2022 berjumlah 68,40 persen, untuk penggunaan komputer berjumlah 4,38 persen, dan untuk yang mengakses internet berjumlah 42,67 persen. Dari hal-hal diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masih cukup banyak penduduk di Kabupaten Aceh Utara yang kurang terbuka terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini.

7.2 KEADAAN SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA

Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Sosial adalah seluruh upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. *Asian Development Bank* (ADB) membagi perlindungan sosial ke dalam 5 elemen, yaitu : (i) pasar tenaga kerja; (ii) asuransi pasar; (iii) Bantuan sosial; (iv) skema mikro dan area based untuk perlindungan bagi komunitas setempat; dan (v) perlindungan anak.

Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Program Perlindungan Sosial	Penerima PIP	Penerima Kartu Keluarga Sejahtera	Penerima Kartu Keluarga Harapan	Penerima BPNT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ya	11,69	12,80	22,07	22,66
Tidak	88,31	87,20	77,93	77,34

Sumber: *Susenas, BPS Kabupaten Aceh Utara*

Berdasarkan Tabel 7.1 dapat dilihat bahwa terdapat berbagai jenis program perlindungan sosial yang telah diberlakukan di Kabupaten Aceh Utara. Dari program perlindungan sosial yang ada di tabel tersebut, persentase penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lebih mendominasi dibandingkan jenis program perlindungan sosial lainnya dengan jumlah 22,66 persen di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2022. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Utara 2021*. Badan Pusat Statistik: Kabupaten Aceh Utara
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Utara 2020*. Badan Pusat Statistik: Kabupaten Aceh Utara
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Utara 2019*. Badan Pusat Statistik: Kabupaten Aceh Utara
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2021*. Badan Pusat Statistik: Provinsi Aceh
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2020*. Badan Pusat Statistik: Provinsi Aceh
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Indikator Tenaga Kerja Provinsi Aceh Agustus 2021*. Badan Pusat Statistik: Provinsi Aceh
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Aceh Agustus 2020*. Badan Pusat Statistik: Provinsi Aceh
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Kabupaten Aceh Utara Dalam Angka Tahun 2021*. Badan Pusat Statistik: Kabupaten Aceh Utara
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Kabupaten Aceh Utara Dalam Angka Tahun 2020*. Badan Pusat Statistik: Kabupaten Aceh Utara
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Utara 2022*. Badan Pusat Statistik: Kabupaten Aceh Utara
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Utara 2021*. Badan Pusat Statistik: Kabupaten Aceh Utara
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Utara 2020*. Badan Pusat Statistik: Kabupaten Aceh Utara

LAMPIRAN

<https://acehnutarakab.bps.go.id>

ISTILAH TEKNIS

Perkotaan

Karakteristik sosial ekonomi dari wilayah administrasi terkecil. Wilayah ini dikatakan sebagai perkotaan jika memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, lapangan kegiatan ekonomi utama, fasilitas-fasilitas perkotaan (jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya). Secara operasional penentuan daerah perkotaan tadi dibuat dengan sistem skoring tertentu. Prosedur penentuan daerah perkotaan berlaku sejak tahun 1980 dan masih berlaku hingga saat ini.

I. Kependudukan

Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

Rasio Ketergantungan Hidup

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 Tahun) dikalikan 100.

Kepadatan Penduduk

Rata-rata Banyaknya penduduk per kilometer persegi

Rasio Ibu-Anak

Rata-Rata banyaknya anak dibawah usia lima tahun per 1000 perempuan usia subur (15-49 tahun).

Rasio Jenis Kelamin

Banyaknya laki-laki dari setiap 100 perempuan.

Metode Kontrasepsi

Cara/alat pencegah kehamilan

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)

Orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi

Medis Operasi Perempuan (MOW/Sterilisasi Perempuan/Tubektomi)

Operasi yang dilakukan pada perempuan untuk mencegah terjadinya kehamilan,

yaitu mengikat saluran telur agar perempuan itu tidak dapat mempunyai anak lagi. Operasi untuk megambil rahim atau indung telur kadang-kadang dilakukan karena alasan-alasan lain, bukan untuk memberikan perlindungan agar perempuan tidak mempunyai anak lagi. Yang dicatat sebagai sterilisasi disini hanya operasi yang ditujukan agar seorang perempuan tidak bisa mempunyai anak lagi.

Medis Operasi Pria (MOP/Sterilisasi Pria/Vasektomi)

Operasi ringan yang dilakukan pada pria dengan maksud untuk mencegah terjadinya kehamilan pada pasangannya/

IUD (Intra Uterus Device)/AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim/Spiral)

Alat yang dibuat dari plastik halus/tembaga, berukuran kecil, berbentuk spiral, T, kipas dan lainnya. Dipasang didalam rahim untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Suntikan KB

Salah satu cara pencegahan kehamilan dengan jalan menyuntikkan cairan tertentu ke dalam tubuh, misalnya satu, tiga atau enam bulan sekali (cara ini disebut juga dengan *depo provera*).

Pil KB

Pil yang diminum untuk mencegah terjadinya kehamilan. Pil ini harus diminum secara teratur setiap hari. Orang dikatakan sedang menggunakan pil KB, apabila sejak haid terakhir, ia minum pil KB setiap hari.

Kondom/Karet KB

Alat yang terbuat dari karet, berbentuk seperti balon, yang dipakai oleh laki-laki selama bersenggama dengan maksud agar isterinya/pasangannya tidak menjadi hamil. Orang dikatakan sedang menggunakan kondom apabila sejak haid terakhir pasangannya selalu menggunakan kondom apabila sejak terakhir pasangannya selalu menggunakan kondom waktu berkumpul, termasuk saat kumpul terakhir.

Norplant/Implant/Susuk KB

Enam batang logam kecil yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas untuk mencegah terjadinya kehamilan. Orang dikatakan menggunakan susuk KB apabila susuk KB terakhir dipasang ditubuhnya kurang dari 5 (lima) tahun sebelum pencacahan.

Alat Kontrasepsi Lainnya

Intravag (tissue KB yang dimasukkan kedalam vagina sebelum kumpul), cara tradisional, MOW, dan MOP.

Alat/Cara Tradisional

Pantang berkala/sistem kalender, senggama terputus, tidak campur, jamu danurut.

Angka Kematian Bayi

Probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, hal ini dinyatakan dengan perseribu kelahiran bayi.

Angka Harap Hidup pada Waktu Lahir

Suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.

II. Kesehatan

Keluhan Kesehatan

Keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Rawat Jalan atau Berobat Jalan

Kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien.

III. Pendidikan

Sekolah

Kegiatan bersekolah di sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

Tidak/Belum Pernah Sekolah

Tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke SD.

Masih Bersekolah

Sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi

Tidak Sekolah Lagi

Pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

Tamat Sekolah

Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah

Rasio anak yang sekolah di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia normal untuk jenjang yang sama.

Angka Partisipasi Murni

Rasio anak yang sekolah bersekolah tepat waktu di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia normal untuk jenjang yang sama.

Angka Melek Huruf

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis.

IV. Ketenagakerjaan**Penduduk Usia Kerja**

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai pekerja.

Angkatan Kerja

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.

Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya

bersekolah, mengurus rumah tangga dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja atau mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Rasio antara penduduk yang menganggur terhadap total penduduk angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terselubung

Rasio antara penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal yaitu 35 jam sehari terhadap total penduduk yang bekerja.

Jam Kerja

Rata-rata jam kerja perhari, tidak termasuk jam istirahat.

V. Perumahan

Rumah Tangga

Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.

Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur dan ruangan khusus untuk usaha seperti warung atau sejenisnya.

Dinding

Sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.

Atap

Penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami

dibawahnya dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

Air Leding

Sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM.

VI. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang meliputi kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup yang layak.

Daya Beli

Kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Pengeluaran

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN ACEH UTARA**

Jl. Medan-Banda Aceh Km 295,7 Desa Alue Drien Landing
Lhoksukon, 24382 Telp/Fax: (0645) 8454005
Homepage: <http://acehutarakab.bps.go.id>
Email: bps1111@bps.go.id